

Perempuan dan Perhutanan Sosial

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Perhutanan Sosial

Artikel

Inovasi dan Tantangan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Ernawati Eko Hartono & Khulfi Muhammad Khalwani

Perempuan Pejuang Sutra di Kabupaten Wajo: Aktor Tunggal dan Tantangan Akses Program Perhutanan Sosial
Sukma Taroniarta & Nurul Huda Yahya

Perlawanan Harian Perempuan untuk Percepatan Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS)
Kasmiati & Ganies Oktaviana

Kebijakan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender: Studi Kasus Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perhutanan Sosial dan Pemberian Izin Perhutanan Sosial
Enik Ekowati & Muamar

Partisipasi Perempuan dalam Pangan Agroforestri di Kalimantan Tengah: Tantangan dan Hambatan
Nur Dwiwati

Analisis Ekonomi Politik Agraria dalam Akses Hutan di Wilayah Perhutani Melalui Program Perhutanan Sosial
Sartika Nur Shalati

Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Lima Provinsi
Abby Gina Boang Manalu, Nur Iman Subono, & Retno Daru Dewi G.S. Putri

Diterbitkan oleh:

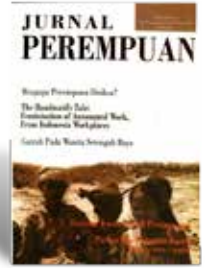


Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- ☐ SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- ☐ SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- ☐ SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- ☐ SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- ☐ SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8

(Mohon bukti transfer diemail ke himah@jurnalperempuan.com)

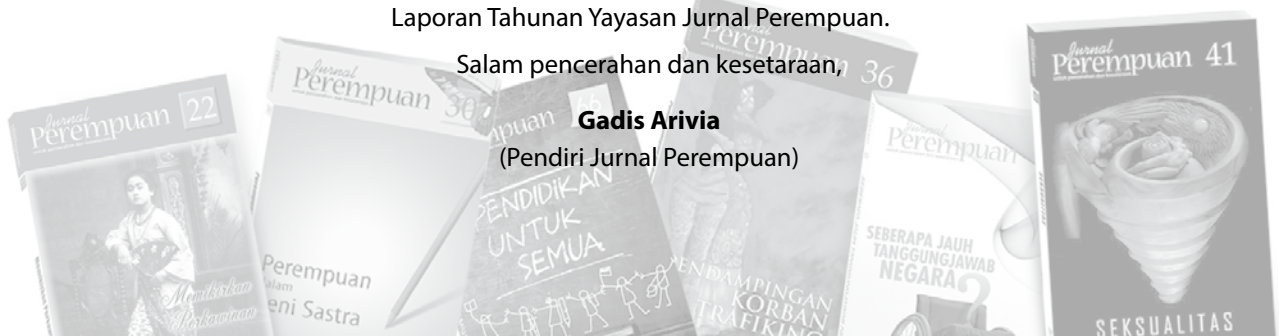
Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah
(Hp 081807124295, email: himah@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia
(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif, M.Fil. (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Prof. Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Abby Gina Boang Manalu, M.Hum.

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum
Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University
California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer,
Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender,
UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIP, Universitas
Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty
of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D. (Sejarah dan Politik
Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas
Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
Prof. Dr. E. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, Ph.D. (University of Melbourne)
Dr. (Iur) Asmin Fransiska, S.H., LL.M. (Universitas Katolik
Atma Jaya)
Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Northwestern University)
Ro'fah, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, Ph.D. (University of Western
Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Universitaet Marburg)
Sari Andajani, Ph.D. (Auckland University of Technology)
Prof. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Indonesian Scholarship and
Research Support Foundation)
Prof. Dr. Widjajanti M. Santoso, M.Litt. (Indonesian
Institute of Sciences)

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Universitas Indonesia)
Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)
Dr. Sri Lestari Wahyuningroem (Universitas
Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)
Francisia Saveria Sika Seda, Ph.D. (Universitas
Indonesia)
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat
Driyarkara)
Mia Siscawati, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Dr. L.G. Saraswati Putri (Universitas Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Appalachian State University,
USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (University California,
Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (President University)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (University of
Copenhagen)

REDAKSI

Retno Daru Dewi G.S. Putri, M.A., M.Hum.
Iqraa Runi Aprilia, S.Hum.

REDAKSI TAMU

Ikhaputri Widiyanti, S.Hum., M.Si.
Andi Misbahul Pratiwi, S.T., M.Si.

ASISTEN REDAKSI

Nada Salsabila
Fani Salsabila

SAHABAT JURNAL PEREMPUAN & MARKETING

Himah Sholihah
Iqraa Runi Aprilia, S.Hum.

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

HOTLINE PELANGGAN

Himah Sholihah: 0818 0712 4295 (SMS/WA)

ALAMAT REDAKSI

Alamanda Tower, 25th Floor
Jalan T.B. Simatupang kavling 23-24, Jakarta Selatan
Telepon: (+62) 21 2965 7992
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

Twitter: @jurnalperempuan

Facebook: Yayasan Jurnal Perempuan

WEBSITE

www.jurnalperempuan.org www.indonesiafeministjournal.org

Cetakan Pertama, April 2022



The Asia Foundation

Ucapan Terima Kasih kepada Mitra Bestari

1. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto
2. Francisia Saveria Sika Seda, Ph.D.
3. Dr. Pinky Saptandari
4. Mariana Amiruddin, M.Hum.
5. Dr. Ida Ruwaida Noor
6. Mia Siscawati, Ph.D.

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Perhutanan Sosial/ <i>Women and Social Forestry</i>	v-vi
<i>Abby Gina Boang Manalu</i>	

Artikel

- Inovasi dan Tantangan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia/*The Innovations and Challenges of Gender Mainstreaming in Indonesia's Ministry of Environment and Forestry* 1-14
Ernawati Eko Hartono & Khulfi Muhammad Khalwani
- Perempuan Pejuang Sutra di Kabupaten Wajo: Aktor Tunggal dan Tantangan Akses Program Perhutanan Sosial/*Women as Silk Warriors in Wajo District: Sole Actors and the Challenges of Access to Social Forestry Programs* 15-27
Sukma Taroniarta & Nurul Huda Yahya
- Perlawanan Harian Perempuan untuk Percepatan Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS)/*Women's Everyday Forms of Resistance to the Acceleration of the TORA and SF Policies* 29-41
Kasmiati & Ganies Oktaviana
- Kebijakan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender: Studi Kasus Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perhutanan Sosial dan Pemberian Izin Perhutanan Sosial/*Gender Responsive Social Forestry Policy: A Case Study of Laws and Regulations in the Social Forestry Sector and the Granting of Social Forestry Permits* 43-55
Enik Ekowati & Muamar
- Partisipasi Perempuan dalam Pangan Agroforestri di Kalimantan Tengah: Tantangan dan Hambatan/*Women's Participation in Food Agroforestry in Central Kalimantan: Challenges and Obstacles* 57-71
Nur Dwiwati
- Analisis Ekonomi Politik Agraria dalam Akses Hutan di Wilayah Perhutani Melalui Program Perhutanan Sosial/*An Analysis of Agrarian Political Economy in Forest Access in Perhutani-Managed Areas Through Social Forestry Programs* 73-84
Sartika Nur Shalati
- Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Lima Provinsi/*Women's Participation in Social Forestry: A Case Study in Five Provinces* 85-99
Abby Gina Boang Manalu, Nur Iman Subono, & Retno Daru Dewi G.S. Putri

Perempuan dan Perhutanan Sosial

Women and Social Forestry

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan dua isu penting dalam program pembangunan. International Union for Conservation of Nature (IUCN) menyatakan bahwa perempuan memainkan peran kunci dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam pertanian dan sistem lanskap hutan di sepanjang mata rantai. Menurut IUCN (2021), di negara-negara berkembang, sebanyak 43% perempuan terlibat dalam kerja-kerja pertanian dan menggantungkan hidup pada hutan. Data yang sama memperkirakan bahwa ketika perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya produktif seperti laki-laki maka perempuan akan dapat berkontribusi dalam peningkatan hasil pertanian di negara berkembang sebesar 2,5% hingga 4%. Pelibatan perempuan secara global berimplikasi pada penurunan angka kelaparan dunia sebesar 12% hingga 17%. Keterlibatan perempuan dalam akses dan tata kelola hutan terbukti meningkatkan ekonomi perempuan dan komunitas di sekitar wilayah hutan.

Senada dengan data IUCN, dalam konteks Indonesia, banyak perempuan menggantungkan hidupnya dari akses dan pengelolaan hutan. Mereka mengelola lahan dan mengumpulkan hasil hutan, baik untuk kebutuhan sehari-hari atau diolah untuk dijual pada komunitas yang lebih luas. Perempuan juga memiliki pengetahuan terkait dengan tumbuhan obat-obatan dan berbagai potensi lain hasil hutan. Tidak hanya itu, ketergantungan perempuan terhadap hutan juga kerap lebih tinggi bila dibanding dengan laki-laki. Kelompok perempuan merupakan kelompok rentan dan terancam keberlangsungan hidupnya ketika terjadi degradasi hutan atau ketika akses mereka terhadap hutan dihilangkan. Sejumlah fakta ini merupakan landasan pentingnya pelibatan perempuan dalam tata kelola hutan di Indonesia. Tidak hanya itu, sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan perempuan terkait dengan sumber daya dan pengelolaan hutan memberikan kontribusi penting dalam memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Ironisnya, terlepas dari besar dan pentingnya kontribusi perempuan dalam pengelolaan hutan, International Union for Conservation of Nature (2020) menunjukkan bahwa secara global, partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam tata kelola hutan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional sangatlah

rendah. Data KLHK juga menunjukkan bahwa bentuk partisipasi perempuan dalam perhutanan sosial hanya 5% dari pemegang izin perhutanan yang memiliki anggota perempuan di dalamnya (VOA Indonesia 2021). Sejumlah pendekatan berbasis perspektif feminisme menunjukkan bahwa berbagai asumsi di tingkat tapak, nasional, serta internasional masih memercayai bahwa perempuan bukan subjek relevan dalam pengelolaan hutan secara formal dan dari pengambil keputusan. Asosiasi hutan dengan nilai dan sifat maskulin membuat perempuan menjadi liyan dalam tata kelola hutan.

Untuk memastikan adanya pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, pemerintah telah menghadirkan program Perhutanan Sosial. Program ini dilaksanakan dalam kawasan hutan negara/hutan hak/hutan adat oleh masyarakat sekitar hutan atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk tujuan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial. Program ini tentu merupakan peluang untuk memastikan keterlibatan perempuan secara formal di dalam perhutanan. Kebijakan ini bahkan sudah mengenali dan menyatakan secara tertulis bahwa perempuan merupakan subjek dari kebijakan perhutanan sosial. Oleh sebab itu, mereka berhak mendapatkan manfaat dari program tersebut. Perhutanan sosial memungkinkan adanya formalisasi hak terhadap hutan kolektif dalam beberapa tahun terakhir. Para sarjana feminis seperti Agarwal dan Colfer percaya bahwa dibutuhkan pengakuan formal terhadap perempuan dan berbagai kelompok marginal dalam jalinan identitasnya dengan etnis, kelas, orientasi seksual, dan identitas gender untuk memastikan tata kelola yang berkeadilan. Tanpa adanya pengakuan formal, kepentingan mereka kerap dikeluarkan dari pembuatan keputusan, baik secara eksplisit maupun implisit.

Dalam praktik pengelolaan hutan, para sarjana feminisme percaya pada dasar penyingkiran perempuan, yaitu adanya asosiasi hutan dan maskulinitas. Maskulinitas hutan telah menjadikan pandangan dan kebutuhan kelompok laki-laki sebagai norma yang berlaku untuk semua tanpa mempertimbangkan perspektif dan pengetahuan kelompok lain. Tanpa memastikan pengelolaan hutan yang inklusif maka kelompok dengan ide, preferensi, dan kebutuhan berbeda terkait dengan tata kelola hutan akan tersingkirkan (Arora-Jonsson 2009).

Sejumlah penelitian yang didokumentasikan dalam *JP 111 Perempuan dan Perhutanan Sosial* menunjukkan potret partisipasi perempuan dalam tata kelola hutan di Indonesia. Sejumlah upaya telah dilakukan melalui kebijakan dan kerja-kerja berbagai pihak demi memastikan perempuan tidak tersingkir dari pemanfaatan program. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami kesulitan untuk dapat berpartisipasi secara utuh dalam akses dan tata kelola hutan.

Beberapa persoalan ketimpangan gender dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan, antara lain akses perempuan terhadap lahan, hutan dan berbagai sumber daya lainnya lebih sedikit dibandingkan laki-laki, perempuan kurang terepresentasikan dan kurang memiliki pengaruh dalam pembuatan keputusan publik dan pada posisi kepemimpinan di dalam institusi pemerintahan terkait dengan bidang perhutanan, perempuan kurang memiliki akses terhadap teknologi serta informasi terkait hutan dan agroforestri, perempuan dieksklusi dari komoditas hutan yang bernilai ekonomis tinggi, serta perempuan memikul beban perawatan rumah tangga dan kurang terepresentasi dalam program-program mitigasi dan inisiatif terkait dengan

isu perubahan lingkungan (Cifor 2021). Seluruh kondisi ini sesungguhnya saling tumpang-tindih. Namun, perempuan tidak sekadar korban pasif dari suatu sistem ketimpangan. Berbagai studi yang dilakukan oleh para penulis yang dihimpun dalam *JP 111 Perempuan dan Perhutanan Sosial* menunjukkan agensi perempuan. Di tengah tantangan norma gender dan ketimpangan struktural yang ada, perempuan membangun resiliensinya melalui aksi-aksi kolektif. Partisipasi perempuan terbukti menyokong keberlangsungan lingkungan, komunitas, dan keluarga.

JP 111 menghadirkan tantangan dan capaian keadilan gender dalam perhutanan sosial di Indonesia. Pengelolaan dan konservasi hutan yang inklusif perlu dilakukan secara holistik. Selain adanya perubahan struktural pada kebijakan, perlu dipastikan juga terjadinya perubahan kesadaran di tingkat masyarakat. Pelibatan perempuan secara formal dalam perhutanan sosial perlu dipastikan supaya menghasilkan pemberdayaan. Artinya, partisipasi perempuan dalam tata kelola hutan pada perhutanan sosial tidak sekadar menghasilkan penguatan ekonomi, tetapi lebih jauh perlu memastikan transformasi sosial kelompok perempuan yang mencakup penguatan politik, sosial, dan budaya (**Abby Gina**).

Ernawati Eko Hartono¹ & Khulfi Muhammad Khalwani²
Kelompok Kerja (Pokja) Gender, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan¹ & Perencana Ahli Muda,
Biro Perencanaan-KLHK²

**Inovasi dan Tantangan Pengarusutamaan Gender
di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia**

*The Innovations and Challenges of Gender Mainstreaming in
Indonesia's Ministry of Environment and Forestry*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 27 No. 1, April 2022, hal. 1-14, 1 tabel, 2 gambar,
22 daftar pustaka

The issue of gender equality in various fields related to natural resource management, including the environment and forestry, has long been a concern of social researchers, especially the issue of gender bias in planning, management, marketing, benefits and impacts. This paper aims to provide a descriptive analysis of the innovations and challenges of implementing gender mainstreaming ('pengarusutamaan gender'—PUG) in government agencies, namely the Ministry of Environment and Forestry ('Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan'—KLHK). PUG is a strategy that aims to achieve gender justice through policies, programs and activities that take into account the experiences, aspirations, needs and problems of men and women in the process of monitoring and evaluating all aspects of life and development. The data for this research was collected through a desk study and interviews. The results of the analysis show the implementation of a PUG policy in the KLHK has encouraged internal parties to pay more attention to the issue of gender equality, both in leadership and in program implementation. These innovations must continue to be developed consistently so they can be an inspiration and an example for other government agencies, both at the central and regional levels.

Keywords: gender responsive policy, equality, development, gender mainstreaming, Indonesian Ministry of Environment and Forestry

Isu kesetaraan gender pada berbagai bidang terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam, termasuk lingkungan hidup dan kehutanan, telah lama menjadi perhatian para peneliti sosial, khususnya permasalahan tentang bias gender dalam proses perencanaan, pengelolaan, pemasaran, hingga akses manfaat dan/ atau penerima dampak. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan analisis deskriptif terhadap inovasi dan tantangan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pengarusutamaan Gender merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan. Metode yang digunakan adalah desk study dan wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan PUG di KLHK telah mampu mendorong para pihak di Internal KLHK untuk lebih memperhatikan isu kesetaraan gender, baik dari aspek kepemimpinan maupun pada implementasi program/kegiatan. Inovasi tersebut harus tetap dikembangkan secara konsisten sehingga bisa menjadi pendorong dan contoh bagi instansi pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di daerah.

Kata kunci: Kebijakan Responsif Gender, kesetaraan, pembangunan, Pengarusutamaan Gender, Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan Indonesia

Sukma Taroniarta & Nurul Huda Yahya
Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Wilayah Sulawesi

**Perempuan Pejuang Sutra di Kabupaten Wajo:
Aktor Tunggal dan Tantangan Akses Program
Perhutanan Sosial**

*Women as Silk Warriors in Wajo District: Sole Actors and the
Challenges of Access to Social Forestry Programs*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 27 No. 1, April 2022, hal. 15-27, 3 tabel, 4 gambar,
14 daftar pustaka

Silk is a symbol of cultural grandeur in South Sulawesi. Complex business issues, and lifestyle changes within communities, has led to the silk industry being vulnerable to abandonment. Social Forestry, through a scheme to increase nontimber forest product businesses on community lands, can provide economic opportunities for silk-based businesses, which are dominated by women. This study is a qualitative study supported by quantitative data. Direct observations and in-depth interviews were conducted with several key figures in the silk business in Canru Village, Wajo Regency, South Sulawesi. The results of the study show that economic pressure is the main motivation for shifting roles in the silk business, but there are several other obstacles that threaten the sustainability of the silk industry, which has lasted for hundreds of years.

Keywords: women and silk, economy empowerment, KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial—Business Group of Social Forestry)

Sutra merupakan salah satu simbol kebesaran budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Kompleksitas permasalahan pegiat sutra serta dinamika gaya hidup yang telah disusupi budaya luar menyebabkan posisi sutra rentan untuk ditinggalkan. Perhutanan Sosial melalui skema peningkatan usaha hasil hutan bukan kayu di lahan rakyat memberikan peluang dan akses pengelolaan kepada para pegiat sutra yang kini didominasi oleh para perempuan. Secara sosial budaya, peran perempuan dalam industri sutra telah lama ada dan semakin kuat akibat terjadinya diversifikasi mata pencaharian. Kajian ini merupakan kajian kualitatif dan didukung dengan data-data kuantitatif. Pengamatan langsung serta wawancara secara mendalam dilakukan ke beberapa tokoh kunci usaha persuteraan yang berada di Kampung Canru, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Hasil kajian menunjukkan tekanan ekonomi sebagai motivasi terjadinya pergeseran-peralihan peran dalam usaha sutra serta beberapa kendala yang mengancam keberlanjutan usaha sutra yang telah bertahan selama ratusan tahun.

Kata kunci: perempuan dan sutra, pemberdayaan ekonomi, KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial)

Kasmianti¹ & Ganies Oktaviana²

Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat¹
& Sajogyo Institute²

**Perlawanan Harian Perempuan untuk Percepatan
Kebijakan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
dan Perhutanan Sosial (PS)**

*Women's Everyday Forms of Resistance to the Acceleration
of the TORA and SF Policies*

Kode Naskah: DDC305

Jurnal Perempuan, Vol. 27 No. 1, April 2022, hal. 29-41, 48 daftar pustaka

This paper analyzes the women's everyday forms of resistance, in formal and informal spaces, to the acceleration of the Land Objects of Agrarian Reform ('Tanah Objek Reforma Agraria'—TORA) and Social Forestry (SF) policies in Sigi Regency in Central Sulawesi. The women's resistance is a broader manifestation of To-Kaili philosophy regarding the role of women as the center and base in maintaining harmony between God, humans, and nature, including in the management of agrarian resources ('sumber-sumber agraria'—SSA). Women who are fighting for gender-based agrarian justice still encounter some obstacles, including limited awareness of gender-based agrarian justice and the challenge of the resistance not yet being dominant.

Keywords: Social Forestry, agrarian reform, everyday forms of resistance, agrarian justice, gender justice

Naskah ini menganalisis perlawanan harian perempuan yang diartikulasikan dari ruang informal ke ruang yang lebih formal, terutama dalam percepatan Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS) di Kabupaten Sigi. Perlawanan harian perempuan sebenarnya bentuk manifestasi yang lebih luas dari filosofi To-Kaili tentang peran perempuan sebagai pusat dan dasar dalam menjaga keharmonisan tuhan, manusia, dan alam, termasuk di dalamnya pengurusan Sumber-Sumber Agraria (SSA). Meskipun begitu, upaya-upaya perlawanan perempuan memperjuangkan keadilan SSA berbasis gender masih menemukan hambatan, antara lain kesadaran parsial (partial consciousness) terhadap keadilan SSA berbasis gender dan perlawanan yang belum menghegemoni.

Kata kunci: Perhutanan Sosial, Reforma Agraria, perlawanan harian, keadilan agraria, keadilan gender

Enik Ekowati¹ & Muamar²

Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat¹
& Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial
dan Kemitraan Lingkungan²

Kebijakan Perhutanan Sosial yang Responsif Gender: Studi Kasus Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perhutanan Sosial dan Pemberian Izin Perhutanan Sosial

*Gender Responsive Social Forestry Policy:
A Case Study of Laws and Regulations in the Social Forestry
Sector and the Granting of Social Forestry Permits*

Kode Naskah: DDC305

Jurnal Perempuan, Vol. 27 No. 1, April 2022, hal. 43-55, 1 tabel, 13 daftar pustaka

This article focuses on two issues; whether the Directorate General of Social Forestry and Environmental Partnership has integrated gender issues into laws and regulations and policy implementation, and whether these issues have been applied to the granting of Social Forestry permits. This study uses empirical legal research methods to assess the application of gender issues in the Social Forestry Regulations and Permit Policy. The results of this study indicate an increase in the number of Social Forestry provisions that regulate gender issues. That is, in the Minister of Environment and Forestry Regulation No. 83 of 2016 there are two articles that regulate gender issues, whereas in the Minister of Environment and Forestry Regulation No. 9 of 2021 there are seven articles. The integration of gender responsive articles and the implementation of gender responsive practices has led to significant changes such as the management by women of two Social Forestry Business groups, Katimpun Village and Damaran Village. This process represents the first step of positive change in the implementation of gender mainstreaming policies in environmental issues in the Ministry of Environment and Forestry.

Keywords: Social Forestry, gender issues in Social Forestry, permits for Social Forestry management, women and Social Forestry, laws and regulations

Artikel ini berfokus pada dua masalah, yaitu apakah Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan telah memerhatikan dan mengintegrasikan isu gender dalam Peraturan Perundang-undangan, implementasi kebijakan, serta dalam pemberian izin Perhutanan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk melihat penerapan isu gender dalam Peraturan Perhutanan Sosial dan Kebijakan Pemberian Izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penambahan pasal yang mengatur isu gender. Terdapat dua pasal dalam Peraturan Menteri (Permen) LHK No. 83 Tahun 2016 dan tujuh pasal dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 yang mengatur isu gender. Integrasi pasal responsif gender dan implementasi praktik menunjukkan perubahan yang signifikan seperti pengelolaan oleh perempuan dalam dua kelompok usaha perhutanan sosial, yaitu Desa Katimpun dan Desa Damaran. Proses ini menunjukkan langkah awal perubahan positif dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam persoalan lingkungan dalam KLHK.

Kata kunci: perhutanan sosial, isu gender dalam perhutanan sosial, perizinan pengelolaan hutan sosial, perempuan dan perhutanan sosial, peraturan perundang-undangan

Nur Dwiwati

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Partisipasi Perempuan dalam Pangan Agroforestri di Kalimantan Tengah: Tantangan dan Hambatan

*Women's Participation in Food Agroforestry in Central
Kalimantan: Challenges and Obstacles*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 27 No. 1, April 2022, hal. 57-71, 6 tabel, 17 daftar pustaka

Food Agroforestry is one element of the National Economic Recovery Program, which aims to counter the effects of the Covid-19 pandemic by protecting the economy and promoting food security. The agroforestry program targets Social Forestry Business groups with forest utilization activities. Support is provided in the form of productive economic tools and food agroforestry assistance. This paper examines the involvement of women in food agroforestry activities. The research applies the descriptive approach for secondary data related to food agroforestry activities and interviews with female leaders who are involved in forest management activities and group business development. The results of the analysis show that food agroforestry activities provide economic, ecological, and social benefits for the community. Further, these activities provide access for women to be involved in forest management and utilization, and to support food security and family economies.

Keywords: women's groups, agroforestry, food business management, community economic improvement

Pangan Agroforestri, salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bertujuan sebagai upaya pertahanan ekonomi dan ketahanan pangan akibat pandemi Covid-19. Sasaran Pangan Agroforestri adalah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dengan kegiatan pemanfaatan hutan. Kegiatan ini dilakukan melalui kelola usaha dengan bantuan berupa alat ekonomi produktif dan bantuan Pangan Agroforestri. Tulisan ini dikembangkan untuk mengkaji partisipasi perempuan dalam kegiatan Pangan Agroforestri pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data dari hasil wawancara dengan dua informan kunci, yakni Ketua Kelompok Perempuan Pengelolaan Hutan dan Pengembangan Usaha serta Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Tulisan ini menggunakan analisis gender Sara Longwe. Berdasarkan hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan Pangan Agroforestri tidak hanya memberi manfaat secara ekonomi, ekologi, dan sosial bagi masyarakat, tetapi juga telah memberikan akses kepada kaum perempuan untuk terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan serta usaha kelompok sebagai pendukung dalam ketahanan pangan dan ekonomi keluarga.

Kata kunci: kelompok perempuan, kelola usaha Pangan Agroforestri, peningkatan ekonomi masyarakat, kemanfaatan program, keterlibatan perempuan, perhutanan sosial.

Sartika Nur Shalati

Tim Kerja Perempuan dan Tambang (TKPT)

Analisis Ekonomi Politik Agraria dalam Akses Hutan di Wilayah Perhutani Melalui Program Perhutanan Sosial

An Analysis of Agrarian Political Economy in Forest Access in Perhutani-Managed Areas Through Social Forestry Programs

Kode Naskah: DDC305

Jurnal Perempuan, Vol. 27 No. 1, April 2022, hal. 73-84, 1 tabel, 23 daftar pustaka

The Social Forestry program in Perhutani-managed forest areas aims to improve the welfare of the community through joint management and promote sustainability. The program uses the Partnership Cooperation (Kulin KK) scheme, which is regulated by the Minister of Environment and Forestry Regulation No. P 83 of 2016. However, this program has become a new conflict zone as various actors are competing to dominate forest use. Women, who have allocated more time and energy to the agricultural sector, now have few opportunities to be involved in forest management because of gender biases within the governance and implementation of the Social Forestry program. Women also have to compete with various parties in order to participate in forest management including Perhutani and the Forest Village Community Institution (Lembaga Masyarakat Desa Hutan—LMDH), the party authorized to manage forest utilization programs.

Keywords: forest, Social Forestry, Perhutani, LMDH

Program Perhutanan Sosial di wilayah Perhutani bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan bersama dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. Salah satu skema yang digunakan adalah Kerja sama Kemitraan (Kulin KK) dengan pihak Perhutani yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Namun, program ini justru menjadi arena baru perebutan ruang oleh berbagai aktor yang ingin mendominasi pemanfaatan hutan. Perempuan yang selama ini mengalokasikan lebih banyak waktu dan tenaga di sektor pertanian, memiliki peluang kecil terlibat dalam pengelolaan hutan akibat implementasi tata kelola program Perhutanan Sosial yang sangat maskulin dan bias gender. Perempuan juga harus berhadapan dengan berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan, baik Perhutani maupun Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk menjalankan dan mengelola program pemanfaatan hutan.

Kata kunci: hutan, perhutanan sosial, Perhutani, LMDH

**Abby Gina Boang Manalu¹, Nur Iman Subono²,
& Retno Daru Dewi G.S. Putri³**

Universitas Bina Nusantara¹, Universitas Indonesia²,
& Jurnal Perempuan³

Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Lima Provinsi

*Women's Participation in Social Forestry:
A Case Study in Five Provinces*

Kode Naskah: DDC305

Jurnal Perempuan, Vol. 27 No. 1, April 2022, hal. 85-99, 3 tabel, 15 daftar pustaka

Social Forestry (SF) is one of the government's community-based forest management programs, which aims to balance environmental needs with the welfare of communities around the forest. However, in the program's implementation, due to social norms and gender inequalities, women are often marginalized in access and management of SF. This study analyzes women's participation in SF, primarily from the perspective and experience of women at the site level. This study used qualitative research; data mining was carried out through focus group discussions (FGD) and interviews with women at the site level and with assistance from civil society organizations (CSOs) in five provinces (Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, West Kalimantan, Central Sulawesi, and West Papua). This study shows how cultural barriers affect the forms and good practices of women's participation in SF and their impacts.

Keywords: social forestry, women's participation, gender norms

Perhutanan Sosial (PS) merupakan salah satu program pemerintah terkait pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang bertujuan mendorong kesejahteraan dan keseimbangan lingkungan masyarakat sekitar hutan. Namun dalam implementasinya, karena norma sosial dan ketimpangan struktur gender, perempuan kerap menjadi kelompok marginal dalam akses dan tata kelola PS. Penelitian ini menganalisis partisipasi perempuan dalam PS utamanya dari perspektif dan pengalaman perempuan di tingkat desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penggalan data dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara pada perempuan desa serta para pendamping dari Civil Society Organization (CSO) dari lima Provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat. Penelitian ini menunjukkan bagaimana hambatan kultural keterlibatan perempuan berdampak terhadap bentuk dan praktik baik dari partisipasi perempuan.

Kata kunci: perhutanan sosial, partisipasi perempuan, norma gender

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marginal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Alamanda Tower, 25th Floor,
Jalan T.B. Simatupang kavling
23-24, Jakarta Selatan
Telepon: (62) 21 2965 7992



The Asia Foundation

